

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masyarakat dan lingkungan internasional menganggap Indonesia belum berhasil dalam menyelenggarakan pendidikan dengan standar internasional, yang berarti bahwa lulusan Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan pasar global dan harus segera membenahi sistem pendidikan nasional (Pratiwi 2019, hlm. 51). Tanggapan masyarakat dan lingkungan internasional tersebut seiring dengan diterbitkannya hasil tes internasional yaitu *Programme for International Student Assessment* (PISA) pada tahun 2018, program tersebut merupakan sistem ujian yang diinisiasi oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) diikuti oleh 78 Negara di Dunia. PISA 2018 adalah putaran ketujuh dari program internasional dalam bidang pendidikan sejak tahun 2000, program PISA terdiri atas tes literasi dasar dalam bidang membaca, matematika, dan sains tanpa melihat pada kurikulum Nasional, ketiga subjek itu dianggap dapat menggambarkan kondisi pendidikan disuatu negara.

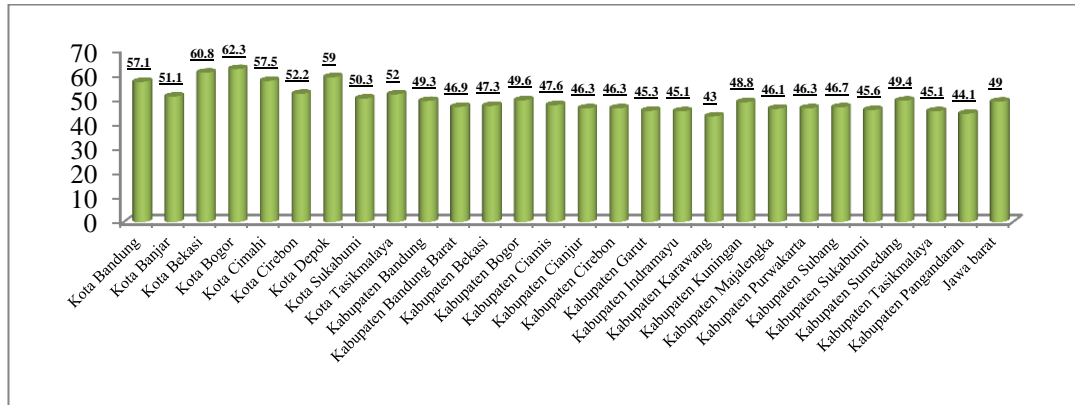
Hasil tes PISA menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca siswa Indonesia berada di tingkat 6 terbawah, kemampuan matematika 7 terbawah dan kemampuan ilmu pengetahuan 9 terbawah. Kemampuan yang ditunjukkan tersebut masih menggambarkan kemampuan literasi pada level 1 jauh jika dibandingkan dengan China yang telah mencapai level 4, dari 6 level tertinggi pada program PISA tersebut (Schleicher A, 2018, hlm. 7-8). Pengamat pendidikan dari *center for education Regulation and Development Analysis* (CERDAS), Indra Charismiadji menyatakan bahwa “Hasil PISA 2018 membuktikan bahwa kualitas pendidikan Indonesia buruk dan merata”. (Syahrul, 2019). selain itu, OECD (dalam Pratiwi, 2019, hlm. 58) menyatakan bahwa dua dari tiga anak di Indonesia tidak dapat mengekstrak informasi yang relevan dari satu sumber literatur. Hasil PISA menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Indonesia untuk memperbaiki sistem pendidikan. Keterampilan siswa yang telah menyelesaikan wajib belajar masih dianggap kurang kompeten. Jika Indonesia tidak mampu membenahi sistem pendidikannya maka akan kalah dalam persaingan global.

Indonesia adalah negara yang memiliki 34 Provinsi besar. Untuk mengukur hasil belajar secara nasional, pemerintah membentuk Ujian Nasional (UN) serta untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik pada jenjang satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai hasil dari proses pembelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Saat ini, UN dibagi menjadi dua macam yaitu Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) sarana lain apabila sekolah masih belum memiliki fasilitas komputer (Kemendikbud, 2019)

Hasil UN jurusan ilmu pengetahuan sosial (IPS) di sekolah menengah atas negeri (SMAN) di seluruh Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan rerata nilai 47,43. Tahun 2018 rerata nilai menunjukkan 46,41 yang berarti terjadi kenaikan rerata nilai secara nasional yaitu sebesar 1,01 poin. Namun, pada tahun 2017 rerata nilai UN untuk jurusan IPS terlihat cukup tinggi yaitu sebesar 48,41 itu berarti bahwa untuk tahun 2019 ini masih belum melampaui hasil UN 2017 terlihat selisih antara 2019 dengan 2017 yaitu 0,98 poin, sedangkan penurunan yang cukup tinggi terlihat pada tahun 2018 dengan 2017 dengan selisih perolehan nilai 2 poin. Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Totok Suprayitno bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan penurunan nilai UN di Indonesia khususnya pada tahun 2018 yaitu faktor pertama, perubahan sistem ujian dari UNKP menjadi UNBK yang menurutnya di UNKP siswa mendapat nilai tinggi karena kecurangan tetapi kini di UNBK siswa mendapatkan nilai murni. Kemudian, faktor kedua adalah adanya soal-soal UN tahun 2018 dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibanding UN pada 2017. (Wildansyah, 2018).

Salah satu diantara 34 provinsi di Indonesia, Jawa Barat merupakan provinsi ketiga terbesar di Indonesia, namun Jawa Barat memperoleh rerata nilai ujian nasional jurusan IPS dengan hasil yang kurang memuaskan. Faktanya, Jawa Barat memperoleh nilai 49, masih kalah jika dibandingkan dengan provinsi DKI Jakarta 68,6. DI Yogyakarta 65,9. Jawa Tengah 58,2. Jawa Timur 54,4. Bangka Belitung 50,8. Bali 49,8. (Puspendik.Kemendikbud.go.id, 2019). Hal tersebut menggambarkan bahwa di Provinsi Jawa Barat terdapat permasalahan pada pendidikan daerahnya. Menyoroti tentang Provinsi Jawa Barat tentunya Provinsi

Jawa Barat memiliki Kabupaten dan atau Kota. Berikut merupakan perolehan rerata nilai Ujian Nasional seluruh mata pelajaran jurusan IPS Kabupaten atau Kota di Jawa Barat ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Rerata Nilai Ujian Nasional SMA Negeri Jurusan IPS Tahun 2019

(Sumber: Puspendik.Kemendikbud.)

Gambar 1.1 menunjukkan perolehan nilai Ujian nasional SMA Negeri jurusan IPS di Jawa Barat pada tahun 2019, dengan perolehan nilai paling tinggi didapat oleh Kota Bogor dengan nilai 62,3. Sementara itu, Kabupaten atau Kota yang mendapat nilai dibawah rata-rata nilai Provinsi Jawa Barat salah satunya yakni Kabupaten Garut dengan perolehan nilai 45,3 dengan urutan ke 23 dari 27 Kabupaten atau Kota di Jawa Barat. Dari perolehan nilai tersebut dapat dikatakan bahwa Kabupaten Garut memiliki permasalahan dari segi pendidikannya. Kabupaten Garut memiliki banyak sekolah diantaranya 31 SMA Negeri yang tersebar diseluruh wilayah, belum dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan Sekolah Swasta lainnya. Namun, masalah pendidikannya kurang diperhatikan pemerintah seperti terdapat sekolah yang masih kekurangan murid serta guru. Hal tersebut bisa menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut terkendala dengan Wilayah Kabupaten Garut yang sangat luas. Sejalan dengan tuntutan masyarakat untuk memekarkan wilayah selatan Kabupaten Garut. Dedi Kurniawan menyatakan upaya keras masyarakat Garut selatan untuk menjadi daerah otonom bukan tanpa alasan, sebagai daerah yang dihitung luas dan jumlah penduduk yang cukup padat, pelayanan Pemda Garut untuk wilayah selatan terbilang minim. (Supriadin, 2019).

Hasil belajar siswa di kabupaten Garut dapat dilihat juga dari hasil Ujian Nasional yang dilakukan, khususnya pada mata pelajaran ekonomi. Mata pelajaran ekonomi pada jenjang SMA Negeri jurusan IPS, merupakan pelajaran yang cukup sulit jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain karena siswa harus mampu membaca secara kontekstual mengenai teori ekonomi sehingga dapat merepresentasikan penerapan teori tersebut kepada kehidupan sehari-hari. Selain itu, pada mata pelajaran ekonomi juga terdapat materi tentang perhitungan, rumus serta kurva. Hal tersebut menandakan bahwa selain kemampuan membaca, kemampuan dasar matematika pun dibutuhkan untuk mata pelajaran ekonomi. Berikut Tabel 1.2 menunjukkan hasil ujian nasional pelajaran ekonomi jenjang SMA Negeri jurusan IPS tahun ajar 2015/2016 sampai tahun ajar 2018/2019.

Tabel 1.1.  
*Nilai Rata-Rata Hasil Ujian Nasional Mata Pelajaran Ekonomi SMA Negeri di Kabupaten Garut*

No	Nama Sekolah	2015/2016	2016/2017	Growth	2017/2018	Growth	2018/2019	Growth
1	SMA Negeri 1 Garut	65.49	69.55	6%	58.13	-16%	61.59	6%
2	SMA Negeri 2 Garut	60.58	63.57	5%	49.06	-23%	57.63	17%
3	SMA Negeri 3 Garut	63.89	49.79	-22%	56.2	13%	56.43	0%
4	SMA Negeri 4 Garut	58.89	41.7	-29%	40.23	-4%	51.67	28%
5	SMA Negeri 5 Garut	52.16	44.34	-15%	35	-21%	41.59	19%
6	SMA Negeri 6 Garut	64.92	48.3	-26%	48.85	1%	52.79	8%
7	SMA Negeri 7 Garut	59.01	47.05	-20%	42.58	-10%	45	6%
8	SMA Negeri 9 Garut	63.85	45.5	-29%	46.25	2%	48.06	4%
9	SMA Negeri 10 Garut	62.35	35.34	-43%	43.27	22%	45.65	6%
10	SMA Negeri 11 Garut	48.76	48	-2%	47.5	-1%	56.11	18%
11	SMA Negeri 12 Garut	64.19	41.04	-36%	40.16	-2%	47.69	19%
12	SMA Negeri 13 Garut	56.37	37.92	-33%	51	34%	52.5	3%
13	SMA Negeri 14 Garut	57.52	42.79	-26%	49.17	15%	58.89	20%
14	SMA Negeri 15 Garut	60.25	40	-34%	43.66	9%	47.9	10%
15	SMA Negeri 16 Garut	61.37	62.5	2%	43.8	-30%	61.25	40%
16	SMA Negeri 17 Garut	56.32	36.41	-35%	43.61	20%	43.96	1%
17	SMA Negeri 18 Garut	63.36	47.21	-25%	41.46	-12%	49.17	19%
18	SMA Negeri 19 Garut	62.21	55.36	-11%	52.36	-5%	57.19	9%
19	SMA Negeri 20 Garut	60.83	44.44	-27%	45.28	2%	49.41	9%
20	SMA Negeri 21 Garut	62.53	52.08	-17%	46.79	-10%	51.46	10%
21	SMA Negeri 23 Garut	59.31	33.38	-44%	33.93	2%	46.67	38%
22	SMA Negeri 25 Garut	60.8	32.5	-47%	39.17	21%	58.33	49%
23	SMA Negeri 26 Garut	61.56	67.5	10%	36.67	-46%	44	20%
<b>Rata-Rata Nilai UN Kabupaten Garut</b>		<b>59.11</b>	<b>45.48</b>	<b>-23%</b>	<b>46.43</b>	<b>2%</b>	<b>52.6</b>	<b>13%</b>
<b>Rata-Rata UN Ekonomi Jawa Barat</b>		<b>56.60</b>	<b>51.37</b>	<b>-9%</b>	<b>47.21</b>	<b>-8%</b>	<b>52.73</b>	<b>12%</b>

<b>Rata-Rata UN Ekonomi Nasional</b>	<b>53.68</b>	<b>51.10</b>	<b>-5%</b>	<b>47.86</b>	<b>-6%</b>	<b>52.41</b>	<b>10%</b>
--	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------

*Sumber: puspendik.kemdikbud.go.id*

Berdasarkan Tabel 1.1 yang menunjukkan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran Ekonomi selama empat tahun yaitu tahun pelajaran 2015/2016 sampai 2018/2019 hasil ujian nasional selama empat tahun ini terlihat fluktuatif. Selain itu, terdapat 8 SMA negeri di Kabupaten Garut yang masih belum konsisten mengikuti ujian nasional mata pelajaran ekonomi. Sehingga, hanya 23 SMA negeri saja yang mengikuti ujian nasional mata pelajaran ekonomi dari 31 SMA Negeri yang ada di Kabupaten Garut. Kemudian, perolehan nilai paling tinggi pada tahun 2018/2019 didapatkan oleh SMA Negeri 1 Garut dan nilai terendah didapatkan oleh SMA Negeri 5 Garut. Apabila melihat pertumbuhan hasil Ujian Nasional dari tahun ke tahun SMAN 1 Garut memperlihatkan hasil yang dinamis dengan *trend* positif, berbeda jika dibandingkan dengan SMAN 5 Garut hasil ujian nasionalnya cenderung mendapatkan *trend* negatif meskipun pada tahun 2018/2019 ada kenaikan 19% dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi perolehan nilainya lebih kecil jika dibandingkan dengan sekolah lainnya.

Perolehan nilai rata-rata ujian nasional di Kabupaten Garut Pada tahun pelajaran 2015/2016 dengan 2016/2017 menunjukkan hasil yang menurun sebesar 23%. Selain penurunan, terjadi kenaikan perolehan nilai rata-rata Ujian Nasional pada tahun pelajaran 2016/2017 dengan 2017/2018 kenaikan perolehan nilai rata-rata tersebut sebesar 2% dan pada tahun pelajaran 2017/2018 dengan 2018/2019 sebesar 13%. Kenaikan selama 2 tahun terakhir masih belum bisa menandingi perolehan nilai rata-rata yang didapatkan pada tahun pelajaran 2015/2016 yaitu sebesar 59.11 masih terdapat selisih 11% dengan tahun pelajaran 2018/2019. Meskipun nilai Ujian Nasional kabupaten Garut mengalami kenaikan selama dua tahun terakhir tetapi perolehan nilai ujian nasional ekonomi Kabupaten Garut masih di bawah rata-rata nilai ujian nasional ekonomi Provinsi Jawa Barat dan juga nilai rata-rata ujian nasional ekonomi secara nasional. Penurunan perolehan rata-rata nilai UN ekonomi di Kabupaten Garut serta rendahnya perolehan nilai UN pada tiga tahun terakhir ini, menggambarkan adanya permasalahan pada hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran ekonomi. Gambaran lebih jelas mengenai rendahnya hasil belajarpun dijelaskan dalam perolehan penilaian tengah

semester (PTS) semester genap pada beberapa SMA Negeri di Kabupaten Garut ditunjukkan dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2.

*Nilai Rata-Rata Penilaian Tengah Semester (PTS) Semester Genap Mata Pelajaran Ekonomi SMA Negeri di Kabupaten Garut Tahun Ajaran 2018/2019*

NO	SEKOLAH	KKM	JUMLAH SISWA	Siswa Mencapai KKM	Siswa Tidak Mencapai KKM	RATA-RATA NILAI
1	SMAN 5 GARUT	65	105	15 (15%)	89 (85%)	55.23
2	SMAN 22 GARUT	73	96	16 (17%)	80 (83%)	58.17
3	SMAN 27 GARUT	76	55	4 (7%)	52 (93%)	62.84
4	SMAN 29 GARUT	75	17	0 (0%)	17 (100%)	52.53
<b>TOTAL</b>			273	35 (13%)	238 (87%)	57.19

*Sumber: Guru Ekonomi (data diolah)*

Tabel 1.2 memperlihatkan data hasil belajar yang ditunjukkan dengan penilaian tengah semester di semester genap mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS SMA Negeri di Kabupaten Garut yang diwakili oleh empat SMA Negeri. Data tersebut menunjukkan bahwa empat sekolah di Kabupaten Garut memperoleh hasil belajar yang kurang maksimal, terbukti dari keempat sekolah tersebut siswa yang mampu mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang ditentukan sekolah baru 13% siswa saja dari 273 siswa yang ada, itu berarti bahwa 87% siswa masih belum bisa mencapai KKM yang ditentukan sekolah. Menurut beberapa Guru Ekonomi di Kabupaten Garut, banyaknya siswa yang belum mencapai KKM yang ditentukan sekolah disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keadaan lingkungan, internal siswa dan guru.

Permasalahan pada lingkungan belajar siswa ditunjukkan oleh lingkungan sekolah itu sendiri, seperti keadaan sekolah meliputi lokasi sekolah, sarana dan prasarana serta manajemen sekolah yang kurang baik sehingga mempengaruhi proses belajar bagi siswa. Kemudian keadaan internal siswa biasanya ditunjukkan dengan perilaku siswa yang memberikan respon negatif kepada guru, seperti kecenderungan siswa dalam menggunakan internet sehingga siswa menganggap mudah materi tanpa memahaminya. Kemudian, lemahnya daya tangkap siswa

yang berhubungan dengan kesiapan siswa dalam menerima materi dan tingkat kejenuhan siswa karena terlalu banyak menerima materi. Selain kedua faktor tersebut, faktor penentu yang mempengaruhi ketidak berhasilan belajar siswa adalah guru. Guru merupakan fasilitator bagi siswa, namun guru juga sering terkendala dengan masalah administrasi diluar acara belajar mengajar, yang mengakibatkan kurangnya persiapan dalam acara mengajar, kesulitan dalam penerapan strategi mengajar, waktu yang terbatas serta materi yang cukup banyak, semuanya memicu ketidak berhasilan belajar siswa.

Keadaan tersebut harus menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Garut, dengan tidak berhasilnya proses belajar siswa maka akan menunjukkan hasil yang kurang memuaskan serta akan menunjukkan kualitas lulusan yang kurang kompeten. Kurang kompetitif dalam persaingan secara nasional ataupun internasional, akan diragukan oleh dunia kerja maupun jenjang pendidikan selanjutnya. Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui data UN maupun PTS dan informasi lainnya, siswa di Kabupaten Garut mendapat permasalahan dari proses belajarnya yang ditunjukkan oleh hasil belajar yang kurang memuaskan. Faktor yang paling menentukan keberhasilan proses belajar selain lingkungan dan siswa. yaitu guru. Guru merupakan kunci keberhasilan proses belajar diluar masalah lainnya, hal itu dapat terjadi karena melalui guru siswa secara langsung berinteraksi membahas materi dalam proses pembelajaran, memaknai proses pembelajaran dan kemudian menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Muhadjir Effendy, mantan Menteri Pendidikan menyatakan bahwa peran guru sebagai pendidik tidak dapat digantikan oleh profesi lain maupun teknologi. Pentingnya guru sebagai seorang pendidik tentunya mengharuskan guru untuk memiliki kompetensi sebagai pengajar. (Kemendikbud.go.id).

Sejalan dengan Shulman (1987, hlm. 8) bahwa seorang guru haruslah memiliki pengetahuan tentang peserta didik dan karakteristiknya, pengetahuan tentang konteks pendidikan, pengetahuan tentang tujuan, nilai, filosofi dan historis tentang pendidikan, pengetahuan konten, pengetahuan kurikulum dan pengetahuan pedagogik. Menurutnya, guru harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana membelajarkan konten materi tertentu atau *pedagogical content*



*knowledge* (PCK) merupakan ciri utama dan unik yang dapat menggambarkan profesionalisme guru karena dengan kemampuan PCK ini guru akan mampu mentransformasikan kemampuan konten yang dimilikinya ke dalam pembelajaran yang dapat menginspirasi siswa untuk belajar. (Shulman, 1987, hlm. 8).

Keller, dkk. (2016), Tarigan, M. & Bunawa, W. (2017), Lucenario, J. dkk. (2016), Mahler, dkk. (2017), Campbell, dkk. (2014), dan Förtsch, C. dkk. (2016) menjelaskan ada pengaruh positif antara *pedagogical content knowledge* terhadap hasil belajar. Hal tersebut diperlihatkan bahwa PCK sangat menjadi faktor penentu yang dapat memprediksi pembelajaran maupun hasil belajar. PCK juga sangat tergantung pada kompetensi yang dimiliki guru, apabila guru tidak memiliki pengetahuan dasar dan tidak pernah menerima pendidikan, maka faktor tersebut akan menimbulkan buruknya PCK yang dimiliki seorang guru. Berbeda, jika seorang guru memiliki pengetahuan yang luas dan menerima pendidikan dengan baik hal tersebut akan menimbulkan baiknya kemampuan PCK guru. Menurut Förtsch, C. dkk. (2016 hlm. 16) PCK guru yang lebih tinggi dapat mengarah pada instruksi pengaktifan yang lebih kognitif, yang pada gilirannya dapat mengarah pada pencapaian siswa yang lebih tinggi. Berdasarkan penemuan tersebut dapat menunjukkan bahwa PCK merupakan pengaruh tidak langsung terhadap hasil belajar. (Mahler, dkk. 2017) serta *Pedagogical Knowledge* disarankan untuk diukur dalam penelitian variabel PCK, serta variabel lebih lanjut dari kompetensi profesional guru harus diperhitungkan, seperti aspek non-kognitif yaitu kepercayaan (Keller, dkk. 2016)

Selain itu terdapat dua penemuan yang tidak mendukung asumsi bahwa Guru dengan PCK yang kuat lebih mungkin mempengaruhi pembelajaran siswa secara positif dari pada guru dengan PCK yang lemah, yaitu penemuan dari Newsome, dkk. (2017) dan Odumosu, dkk. (2018). Ada alasan yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya: tidak mengukur PCK secara empiris yang menangkap apa yang guru uraikan secara verbal, ada pengaruh variabel di luar penelitian, atau jumlah waktu yang signifikan yang diperlukan untuk menerjemahkan perubahan dalam pengetahuan dan kepercayaan ke dalam praktik kelas hal tersebut yang diduga menjelaskan dampak terbatas tersebut.



Berlandaskan pada hasil penemuan para peneliti sebelumnya yang telah diuraikan tentang pengaruh PCK terhadap hasil belajar, dengan hasil penelitian yang bervariasi dan tempat yang berbeda-beda. Pada penelitian kali ini, peneliti sangat ingin mengetahui bagaimana pengaruh PCK guru sebagai pengaruh tidak langsung melalui motivasi belajar terhadap hasil belajar melalui persepsi siswa jika diteliti di Kabupaten Garut, sehingga judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh *Pedagogical Content Knowledge* (PCK) Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Dengan Mediator Motivasi Belajar (Survey pada Siswa Kelas XI IIS SMA Negeri di Kabupaten Garut)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana tingkat *pedagogical content knowledge* (PCK), tingkat motivasi belajar siswa dan tingkat hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Kabupaten Garut?
2. Apakah tingkat *pedagogical content knowledge* (PCK) guru berpengaruh terhadap tingkat hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Kabupaten Garut?
3. Apakah tingkat motivasi belajar memediasi pengaruh tingkat *pedagogical content knowledge* (PCK) guru terhadap tingkat hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Kabupaten Garut?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Gambaran deskriptif tingkat *pedagogical content knowledge* (PCK) guru, tingkat motivasi belajar siswa dan tingkat hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Kabupaten Garut.

2. Tingkat *Pedagogical content knowledge* (PCK) berpengaruh terhadap tingkat hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Kabupaten Garut.
3. Tingkat motivasi belajar memediasi pengaruh tingkat *pedagogical content knowledge* (PCK) terhadap tingkat hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Kabupaten Garut.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan, khususnya tentang pengaruh *pedagogical content knowledge* (PCK) terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi dengan motivasi sebagai variabel mediasi.
2. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dalam ilmu pendidikan.
3. Sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya yang sejenis.

##### **1.4.2 Manfaat Praktik**

1. Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengaruh *pedagogical content knowledge* (PCK) terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi dengan motivasi sebagai variabel mediasi
2. Bagi Pembaca, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai media informasi terkait konsep keilmuan tentang pengaruh *pedagogical content knowledge* (PCK) terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi dengan motivasi sebagai variabel mediasi.

#### **1.5 Struktur Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, kelima bab tersebut sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan merupakan bagian awal dan merupakan perkenalan latar belakang melakukan penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur skripsi.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai kajian teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini membahas mengenai komponen dari metode penelitian yaitu metode penelitian, objek dan subjek populasi atau sampel, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, pengujian instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan pengujian hipotesis.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas mengenai pencapaian hasil penelitian dan pembahasannya.

## BAB V PENUTUPAN

Bagian ini berisi simpulan dan saran yang membahas mengenai penafsiran dan pemaknaan penelitian terhadap hasil analisis temuan.

